



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LABORATORIUM OTONOMI DAERAH

Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor:1001/K/LOD/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tri Anggarani Putri Suprihati

NBI : 1112200077

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran Ujian Skripsi"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juni 2026

Mengetahui
Kepala Lab. Otda,


ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi


Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

Skripsi

by Tri Anggraini

Submission date: 17-Jun-2026 07:21 PM (UTC+0700)

Submission ID: 2984925351

File name: TRI_ANGGARANI_CEK_TURNITIN_UNTAG.docx (2.38M)

Word count: 15478

Character count: 121431

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu isu fundamental yang dihadapi oleh berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan pusat perekonomian regional. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan kompleks seperti tekanan terhadap ketersediaan lahan, infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Sinthawati & Pradana, 2024). Kelahiran adalah proses regenerasi keturunan yang diinginkan oleh semua masyarakat, dan di Indonesia, setiap orang yang telah beranjak dewasa akan menikah dan membentuk keluarga sendiri, bahkan dianggap sedikit aneh ketika seseorang yang telah beranjak dewasa tidak segera menikah. Tingkat perkawinan yang tinggi dan indeks natalitas yang tinggi akan disebabkan oleh hal ini (Janani et al., 2024). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Jawa Timur tepatnya pada Kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan dengan dinamika urbanisasi yang tinggi menghadapi tantangan serius dalam mengelola pertumbuhan penduduknya agar tetap sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang terencana, sistematis, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya dan kualitas pelayanan publik yang memadai.

Tabel 1. 1

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total (jiwa)	Persentase (%)
0-14 tahun	275.412	273.317	548.729	19.1
15-64 tahun	1.030.938	1.033.007	2.063.945	71.8
65+ tahun	130.542	131.098	261.640	9.1

Total	1.436.892	1.437.422	2.874.314	100

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Kecamatan Kenjeran sebagai salah satu dari 31 kecamatan di Kota Surabaya memiliki karakteristik unik sebagai wilayah pesisir yang menghadapi tantangan kependudukan yang cukup signifikan. Menurut publikasi Kecamatan Kenjeran Dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran memiliki luas wilayah 8,21 km² yang terbagi dalam 4 kelurahan yaitu Kelurahan Tambak Wedi, Kelurahan Bulak Banteng, Kelurahan Sidotopo Wetan, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Kenjeran memberikan tekanan besar terhadap ketersediaan ruang, fasilitas umum, dan kualitas lingkungan, khususnya mengingat karakteristik wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur dan rentan terhadap permasalahan lingkungan seperti banjir rob dan pencemaran. Kondisi geografis dan demografis yang kompleks ini menjadikan Kecamatan Kenjeran sebagai salah satu wilayah prioritas dalam implementasi program pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya.

Interpretasi data kependudukan menunjukkan beberapa temuan penting yang memerlukan perhatian serius dalam konteks pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pertama, tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kenjeran yang mencapai 10.932 jiwa per km² menandakan bahwa wilayah ini telah mengalami tekanan demografis yang sangat tinggi, jauh melebihi rata-rata kepadatan penduduk Kota Surabaya yang berada di kisaran 8.628 jiwa per km². Kedua, struktur umur penduduk Kota Surabaya yang didominasi oleh kelompok usia produktif (71,8%) dengan proporsi penduduk usia muda yang signifikan (19,1%) mencerminkan adanya momentum demografis yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan penduduk eksponensial jika tidak dikelola dengan baik melalui program-program kependudukan yang terencana dan berkelanjutan. Ketiga, rasio jenis kelamin di Kecamatan Kenjeran yang relatif seimbang (101,12) menunjukkan adanya kondisi demografi yang normal, namun juga mengindikasikan tingginya potensi fertilitas yang memerlukan intervensi program Keluarga Berencana yang efektif dan komprehensif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fistabella, (2025) yang menyatakan bahwa wilayah dengan karakteristik kepadatan tinggi dan struktur penduduk produktif memerlukan pendekatan kolaboratif dalam implementasi program KB untuk mencapai target pengendalian pertumbuhan penduduk yang optimal. Tingkat pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh masih tingginya tingkat kelahiran dan cepatnya tingkat kematian. Selain itu jumlah pertumbuhan yang tinggi di sebabkan oleh struktur umur penduduk yang tidak seimbang karena sebagian besar penduduk di Indonesia masih berusia muda. Oleh karena itu salah satu kebijakan kependudukan

pemerintah di Indonesia dan telah menunjukkan bukti keberhasilan yaitu kebijakan kependudukan melalui program Keluarga Berencana (KB) (Muaya et al., 2023).

Tabel 1. 2

Data Kependudukan Kecamatan Kenjeran Tahun 2023

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Penduduk/ <i>Population</i>		
	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Kali Kedinding	30.917	30.724	61.641
Sidotopo Wetan	31.283	31.050	62.333
Bulak Banteng	18.724	18.219	36.943
Tambak Wedi	10.293	10.090	20.383
Kecamatan Kenjeran	91.217	90.083	181.300

17

Sumber: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Tabel 1.3

Data Kepadatan Penduduk Tahun 2023

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk (per km ²) <i>Population Density per sq.km</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Tanah Kali Kedinding	34,00	23.261	100,6
Sidotopo Wetan	34,38	34.439	100,8
Bulak Banteng	20,38	12.918	102,8
Tambak Wedi	11,24	17.129	102,0
Kecamatan Kenjeran	100,00	21.305	101,3

Catatan/Note: ---

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya/Population and Civil Registration Agency of Surabaya Municipality

14

Sumber: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Berdasarkan Data Tersebut jumlah penduduk Kecamatan Kenjeran pada tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kenjeran merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang padat di Kota Surabaya. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai ¹⁹upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana (KB) agar pertumbuhan penduduk dapat berjalan secara ⁸seimbang dengan pembangunan daerah. Mengenai kepadatan penduduk tahun 2023, ¹⁵Kecamatan Kenjeran memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Tingginya kepadatan penduduk menunjukkan bahwa ¹⁵jumlah penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tidak sebanding dengan luas wilayah yang tersedia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterbatasan lahan permukiman, meningkatnya kebutuhan fasilitas umum, serta tekanan terhadap lingkungan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Program Keluarga Berencana menjadi salah satu strategi penting dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas wilayah dapat tetap terjaga.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang telah terbukti efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia sejak era Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian, kompleksitas tantangan kependudukan kontemporer menuntut transformasi pendekatan dari model implementasi yang bersifat top-down dan sentralistik menuju paradigma yang lebih partisipatif, inklusif, dan kolaboratif. Menurut Janani et al., (2024) menegaskan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, akademisi, dan media massa dalam suatu kerangka collaborative governance. Konsep collaborative governance menawarkan model tata kelola yang menekankan pada prinsip-prinsip partisipasi multi-stakeholder, transparansi, akuntabilitas, konsensus, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks program KB, penerapan collaborative governance memungkinkan terciptanya sinergi antara kebijakan pemerintah, kapasitas sumber daya, pengetahuan lokal, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan

Sari et al., (2024) menjelaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang diimplementasikan melalui penggunaan alat kontrasepsi memberikan berbagai keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak, perbaikan kualitas kesehatan reproduksi dan seksual keluarga, serta penguatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Program ini terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kelahiran yang secara tidak langsung berdampak pada pengurangan jumlah penduduk, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sehingga program KB memiliki peran vital dalam pencapaian target pembangunan

milennium, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan serta penurunan angka kematian ibu dan balita. Sejarah program KB di Indonesia dimulai pada 23 Desember 1957 dengan pembentukan LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) yang kemudian mengalami transformasi kelembagaan menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Gerakan nasional keluarga berencana ini dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memasuki era Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024, terdapat transformasi penting dalam program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang kini mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Bangga Kencana (Keluarga Berkualitas Indonesia), yang menandai babak baru dalam upaya pembangunan kependudukan di Indonesia.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang telah terbukti efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia sejak era Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian, kompleksitas tantangan kependudukan kontemporer menuntut transformasi pendekatan dari model implementasi yang bersifat top-down dan sentralistik menuju paradigma yang lebih partisipatif, inklusif, dan kolaboratif. Menurut Janani et al., (2024) menegaskan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, akademisi, dan media massa dalam suatu kerangka collaborative governance. Konsep collaborative governance menawarkan model tata kelola yang menekankan pada prinsip-prinsip partisipasi multi-stakeholder, transparansi, akuntabilitas, konsensus, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks program KB, penerapan collaborative governance memungkinkan terciptanya sinergi antara kebijakan pemerintah, kapasitas sumber daya, pengetahuan lokal, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan.

Pemerintah surabaya membuat regulasi dengan menetapkan keputusan peraturan pemerintah nomer 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga dan Perda kota surabaya nomer 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Peningkatan kualitas manusia bersama dengan pertumbuhan penduduk secara kuantitas dapat menimbulkan tantangan dan masalah baru bagi pembangunan.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghalangi upaya untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dia menyatakan bahwa masalah kependudukan akan menyebabkan beban ketergantungan yang tinggi, atau rasio ketergantungan. Angkatan kerja yang produktif harus memelihara beban atau tanggungan yang besar dari penduduk berusia lanjut dan anak-anak. Jika rasio ketergantungan terus meningkat, hal itu akan berdampak buruk pada populasi. Umur perkawinan pertama adalah umur ketika seorang perempuan menikah secara hukum dan biologi, yang berarti dimulainya masa pembuahan, dan merupakan bagian dari dasar kebijakan yang digunakan untuk menghentikan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 1.5 Jumlah Peserta KB

Data Jumlah Peserta KB aktif Kec. Kenjeran Desember 2025

JUMLAH PESERTA KB AKTIF												
BULAN : DES - 2025												
Prov : JAWA TIMUR												
Kab : KOTA SURABAYA												
Kec : KENJERAN												
KODE	KELURAHAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOM I	TUBEK TOM I	MAL	TOTAL	
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (4-11)	13
1001	TANAHKALIKEDINDING	5105	3440	536	43	332	401	12	324	4	5092	13
1002	SIDOTOPOVETAN	4347	2978	389	75	275	345	7	229	5	4313	34
1003	BULAKBANTENG	3667	2565	526	42	125	181	4	200	1	3654	13
1004	TAMBAK WEDI	2345	1681	220	13	112	162	3	136	3	2330	15
JUMLAH TOTAL		15464	10064	1601	173	844	1193	26	889	13	15389	75

Sumber : BKKBN

Penerapan *collaborative governance* pada program KB di Kecamatan Kenjeran menjadi sangat relevan dan strategis mengingat kompleksitas permasalahan kependudukan yang dihadapi serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani isu tersebut secara mandiri. Berdasarkan (Manda et al., 2024) dalam penelitiannya mengenai efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor lokal mampu meningkatkan akseptabilitas program KB di tingkat grassroot dan menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Fistabella, (2025) juga menemukan bahwa *collaborative governance* pada program KB di Kelurahan Jagir Kota Surabaya berhasil meningkatkan cakupan peserta KB aktif, menurunkan angka unmet need KB, dan memperbaiki kualitas

pelayanan KB melalui mekanisme koordinasi multi-stakeholder yang terstruktur dan sistematis. Pembelajaran dari berbagai praktik baik ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk mengeksplorasi bagaimana model collaborative governance dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks spesifik Kecamatan Kenjeran dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya, ekonomi, dan geografis yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang praktik *collaborative governance* pada program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat beserta peran dan kontribusinya, mengkaji mekanisme kolaborasi yang terbangun, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan kolaboratif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep collaborative governance di bidang kebijakan kependudukan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam mengoptimalkan implementasi program KB melalui pendekatan kolaboratif yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) untuk menganalisis implementasi program Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak non-pemerintah melalui tiga komponen utama. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), collaborative governance terdiri atas tiga komponen utama yaitu dinamika kolaborasi (*collaboration dynamics*), tindakan kolaborasi (*collaborative actions*), serta dampak dan adaptasi (*impacts and adaptation*). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan suatu program kolaboratif. Pada aspek dinamika kolaborasi, penelitian ini melihat bagaimana komunikasi, koordinasi, rasa saling percaya, dan pembagian peran antar stakeholders dibangun dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kenjeran. Dinamika kolaborasi menjadi dasar terbentuknya kerja sama antar pihak melalui proses *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Dalam implementasinya, stakeholders melakukan koordinasi rutin, sosialisasi, monitoring program, hingga pelayanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Tindakan kolaborasi, penelitian ini menganalisis bentuk nyata kerja sama yang dilakukan stakeholders dalam mendukung pelaksanaan program KB. Tindakan kolaborasi diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi program KB, pelayanan kontrasepsi, pembentukan Kampung KB, penyuluhan kesehatan reproduksi, pendataan keluarga, serta monitoring dan evaluasi program. Berbagai tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, tenaga kesehatan, kader KB, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengendalian laju pertumbuhan

penduduk. Dampak dan adaptasi, penelitian ini melihat hasil dari pelaksanaan collaborative governance dalam program KB di Kecamatan Kenjeran. Dampak yang muncul antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program KB, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu, stakeholders juga melakukan berbagai bentuk adaptasi untuk mengatasi kendala yang muncul, seperti meningkatkan intensitas sosialisasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang masih memiliki persepsi negatif terhadap program KB.

Melalui penggunaan teori collaborative governance menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses kolaborasi antar stakeholders berlangsung dalam implementasi program KB di Kecamatan Kenjeran. Selain itu, teori ini juga membantu peneliti dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program KB dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

2 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis diatas, maka dapat dirumuskan masalah penting yaitu :

1. Bagaimanakah Collaborative Governance pada program keluarga berencana (KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Collaborative Governance pada program keluarga berencana (KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Di bidang Administrasi Publik, dapat memperkaya literatur dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui kebijakan sosial.
2. Meningkatkan wawasan dan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan collaborative governance.

2 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintah, Menjadi dasar bagi peningkatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

2. Masyarakat, mengetahui peningkatan kualitas hidup dan pengurangan laju penduduk dapat diminimalisis dengan adanya program Kb.

HASIL DAN PEMBAHASAN**4.1 Hasil Penelitian****4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya adalah perangkat daerah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta KB. Diatur melalui Perda Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 (diubah No. 3 Tahun 2021), Perda No. 4 Tahun 2019 (PUG), dan Perwali No. 43 Tahun 2020 Merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda PUG, yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Perwali ini menjadi landasan yuridis operasional, termasuk pembentukan Pokja PUG. Berlokasi di Jl. Kedungsari No. 18, Kec. Tegalsari, Surabaya.

Visi & Misi: Berfokus pada peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan kelembaan.

Tugas & Fungsi: Menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Unit kuncinya meliputi UPTD PPA untuk penanganan kekerasan dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).



3

Gambar 4.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya

Sumber : Satu Data Suraaya

4.1.2 Gambaran Umum ⁶Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program keluarga berencana di Indonesia. Secara nasional, BKKBN dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga.

Di Provinsi Jawa Timur, perwakilan BKKBN dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN pusat guna mengimplementasikan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana). BKKBN Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan program hingga ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Seiring perkembangan waktu, BKKBN Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan peran, tidak hanya dalam pengendalian kelahiran, tetapi juga dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berkualitas. Perwakilan BKKBN Jawa Timur (sekarang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN) berlokasi di Jl. Airlangga No.31-33, Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya

Visi dan Misi BKKBN Provinsi Jawa Timur

Visi

“Mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang di Jawa Timur.”

Misi

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatkan kualitas keluarga melalui program pembangunan keluarga.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
4. Memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kependudukan.
5. Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Tugas dan Fungsi BKKBN Provinsi Jawa Timur : BKKBN Provinsi Jawa Timur memiliki tugas melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di wilayah Jawa Timur. Fungsinya adalah untuk Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan keluarga berencana, Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), Pengelolaan data

dan informasi kependudukan, Pembinaan dan pengembangan program keluarga berencana, Monitoring dan evaluasi program di daerah, Koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan mitra kerja.



6
Gambar 4.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur

Sumber : Kemendukbangga BKKBN Jatim

5 4.1.3 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Dinas Kesehatan Kota Surabaya merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kota Surabaya. Dinas ini berperan sebagai pelaksana kebijakan daerah yang mengacu pada kebijakan nasional di bidang kesehatan. Operasional Dinkes Surabaya saat ini merujuk pada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 23 Tahun 2024, yang mengatur perubahan atas Perwali No. 71 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja. Dinas Kesehatan Kota Surabaya beralamat di Jl. Raya Jemursari No.197, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, peran Dinas Kesehatan Kota Surabaya semakin strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai program kesehatan terus dikembangkan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga upaya promotif dan preventif guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Visi

“Terwujudnya masyarakat Kota Surabaya yang sehat, mandiri, dan berkeadilan.”

Misi

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merata.
2. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
4. Memperkuat sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan informasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Tugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Fungsinya meliputi Pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan, Pengelolaan sumber daya kesehatan, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan, Pelayanan administrasi dan dukungan teknis lainnya.



Gambar 4.3 Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Sumber : Website resmi Dinkes Kota Surabaya

4.1.4 Gambaran Umum Kecamatan Kenjeran

Kecamatan Kenjeran merupakan salah satu kecamatan yang terletak di perbatasan Kota Surabaya dengan Pulau Madura. Dengan luas wilayah sebesar 7.72 km² dan dihuni oleh sekitar 175.906 jiwa. Kecamatan Kenjeran terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kelurahan Bulak Banteng, Kelurahan Tambak Wedi. Memiliki RW 38 dan RT 413. Kecamatan Kenjeran ini juga terkenal karena adanya Jembatan Suramadu yang merupakan akses penghubung Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kantor Kecamatan

Kenjeran berlokasi di Jl. H. Mohammad Noer No. 350, Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya.



Gambar 4.4 Kantor Kecamatan Kenjeran

Sumber : Dokumentasi Penulis

4.2 Penyajian Data

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tidak terlepas dari berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, dan pengendalian penduduk di Indonesia. Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dasar hukum utama yang menjadi landasan penyelenggaraan Program KB adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penyelenggaraan Program Keluarga Berencana guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Program KB tidak hanya berfokus pada pengaturan kelahiran, tetapi juga mencakup peningkatan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga, dan pembangunan keluarga yang sejahtera.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

d. bahwa . . .

Gambar 4.5 UU RI Nomer 52 Tahun 2009

Sumber : BPK RI

Pelaksanaan Program KB juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memberikan kewenangan kepada BKKBN dalam merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, serta mengawasi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di seluruh Indonesia. Melalui regulasi ini, BKKBN menjadi aktor utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program KB bersama pemerintah daerah.



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.**

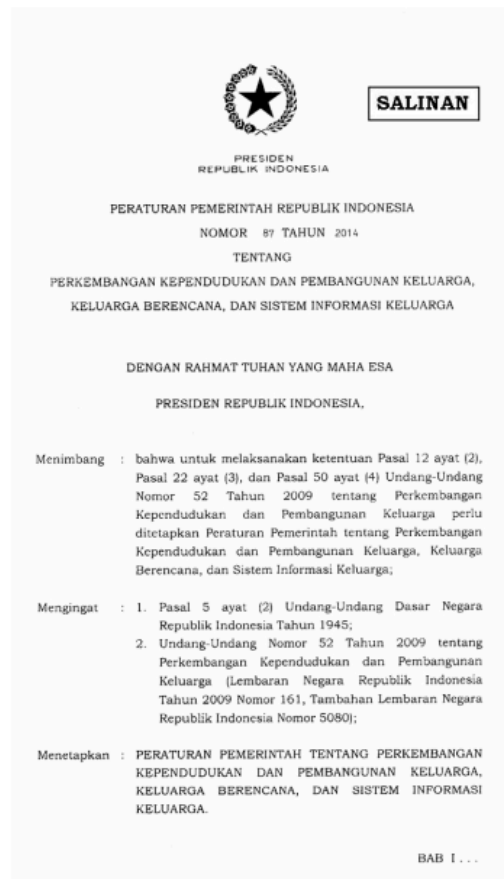
BAB I...

Gambar 4.6 Peraturan Presiden RI Nomer 62 Tahun 2010

Sumber : BPK RI

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) berperan sebagai pelaksana teknis program KB. Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan dan kelurahan, kader

KB, serta masyarakat sebagai sasaran program. Selain itu, pelaksanaan Program KB juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan ini menjelaskan bahwa keberhasilan program KB memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program baik di tingkat pusat maupun daerah.



Gambar 4.7 Peraturan Pemerintah RI

Sumber : BPK RI

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya didasarkan pada berbagai kebijakan yang mengatur pembangunan kependudukan dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Salah satu regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan program tersebut adalah Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan

Kota Surabaya Tahun 2023–2048. Peraturan ini disusun sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang yang bertujuan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 4. 8 Perwali Nomer 55 Tahun 2023

Sumber : JDIH Surabaya

Dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Pengendalian kuantitas penduduk menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan kependudukan yang dilakukan melalui Program Keluarga Berencana. Program tersebut diarahkan untuk mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program KB di Kecamatan Kenjeran dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pelayanan kontrasepsi,

penyuluhan kepada pasangan usia subur, pendataan keluarga, pembinaan kelompok kegiatan keluarga, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melibatkan berbagai aktor, antara lain DP3APPKB Kota Surabaya sebagai koordinator program, BKKBN Provinsi Jawa Timur sebagai pembina teknis, Dinas Kesehatan dan puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai fasilitator wilayah, serta kader KB yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan Program KB menunjukkan bahwa upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu organisasi. Setiap aktor memiliki sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Kondisi tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan kependudukan.

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program KB tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antaraktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran dianalisis menggunakan perspektif *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

4.2.1 Proses Kolaborasi

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis oleh peneliti terkait *collaborative governance*, maka peneliti berniat untuk melihat proses kolaborasi dalam program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Proses kolaborasi yang terjadi dalam program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran ditinjau berdasarkan model *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Berdasarkan model tersebut, proses kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholders meliputi Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, Dampak dan Adaptasi.

Dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kenjeran, proses kolaborasi melibatkan berbagai aktor seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Puskesmas Kecamatan Kenjeran, Kader KB, serta Masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas program KB

dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Kenjeran. Kolaborasi antar stakeholders diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi program KB, pelayanan kontrasepsi, pembentukan Kampung KB, edukasi kesehatan reproduksi, monitoring dan evaluasi program, hingga pemberdayaan masyarakat melalui kader KB dan PKK. Dengan adanya kerja sama lintas sektor tersebut, program KB tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah kelahiran, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.1.1 Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi dalam program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran terbentuk melalui keterlibatan berbagai stakeholders yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan teori collaborative governance menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dinamika kolaborasi terdiri atas principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam melihat bagaimana proses kerja sama antar aktor berlangsung dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kenjeran.

Drivers atau pendorong kolaborasi merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya kerja sama antar stakeholders dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Dalam penelitian ini, faktor pendorong kolaborasi muncul karena adanya kebutuhan bersama untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program KB agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Adanya regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan kolaborasi antar lembaga. Regulasi tersebut mendorong instansi pemerintah untuk saling berkoordinasi dalam upaya pengendalian penduduk melalui program KB.

1. Principled Engagement

Principled engagement merupakan proses keterlibatan antar stakeholders melalui komunikasi, koordinasi, dialog, dan penyampaian informasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kenjeran, principled engagement terlihat melalui adanya koordinasi rutin antara DP3APKB Kota Surabaya, BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah wilayah, kader KB, dan masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat

evaluasi, monitoring program, dan kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan tersebut, setiap stakeholders dapat menyampaikan kendala maupun kebutuhan yang dihadapi selama pelaksanaan program KB. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, maka proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga program dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, principled engagement juga terlihat dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui posyandu, kegiatan PKK, maupun pertemuan warga. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya program KB, kesehatan reproduksi, serta pengaturan jarak kelahiran. Kegiatan ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader KB, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program KB.

Bapak Wildan Penyuluh KB dari DP3APPKB menegaskan bahwa :

“Jadi Begini Mbak di dalam pelaksanaan program KB ini kami memang selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama puskesmas dan kader KB yang ada di wilayah. Koordinasi itu penting karena masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda. Kemudian kami juga rutin mengadakan rapat evaluasi untuk melihat perkembangan program, kendala yang ada di lapangan, serta langkah apa yang perlu dilakukan ke depannya. Selain itu, saat ada kegiatan sosialisasi atau pelayanan KB, kami juga selalu berkomunikasi dengan kader dan tenaga kesehatan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa sama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah dengan adanya koordinasi yang rutin seperti itu, pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan target yang sudah ditentukan lebih mudah dicapai.” (Wawancara pada 21 Mei 2026)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Puskesmas Kenjeran, diketahui bahwa puskesmas memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Keterlibatan tersebut tidak hanya sebatas memberikan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat, tetapi juga mencakup proses identifikasi permasalahan, edukasi kesehatan reproduksi, koordinasi dengan berbagai stakeholder, hingga pelaksanaan monitoring terhadap peserta KB.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sinta Bidan Koordinator Program KB Puskesmas Kenjeran yang menyatakan bahwa:

“Kami bersama penyuluh KB dan kader rutin melakukan pemetaan serta identifikasi masyarakat yang belum mengikuti program KB. Biasanya kami melihat data yang ada, kemudian melakukan pendataan ulang di lapangan untuk mengetahui siapa saja pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB atau yang sudah tidak aktif lagi menggunakan alat kontrasepsi. Dari situ kami bisa mengetahui kebutuhan masyarakat dan menentukan

langkah yang harus dilakukan. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya ada koordinasi terlebih dahulu dengan penyuluh KB dan kader. Dalam pertemuan tersebut kami membahas sasaran kegiatan, lokasi pelayanan, kebutuhan alat dan tenaga kesehatan, serta kendala-kendala yang mungkin muncul di lapangan. Jika ada masalah yang ditemukan saat pelayanan atau sosialisasi sebelumnya, biasanya juga dibahas bersama agar dapat dicari solusi yang tepat. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan memang direncanakan dan dikoordinasikan terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, kami bertugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, konseling, dan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat. Kami juga rutin melakukan pelayanan KB baik di puskesmas maupun melalui kegiatan pelayanan terpadu di masyarakat agar akses pelayanan semakin mudah dijangkau oleh warga.” (Wawancara 23 Mei 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian yang menunjukkan bahwa pihak puskesmas turut melakukan kegiatan pendataan keluarga dan pasangan usia subur sebagai bagian dari proses pelaksanaan Program KB. Dokumentasi tersebut memperlihatkan petugas kesehatan bersama kader dan penyuluh KB melakukan pengumpulan data serta verifikasi informasi masyarakat yang menjadi sasaran program. Kegiatan pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah pasangan usia subur, status kepesertaan KB, serta kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi di wilayah kerja puskesmas. Data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pelayanan, pelaksanaan penyuluhan, serta penentuan sasaran kegiatan pelayanan KB. Dengan adanya dokumentasi tersebut, dapat dibuktikan bahwa peran puskesmas tidak hanya sebagai penyedia layanan kesehatan dan kontrasepsi, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat aktif dalam proses pendataan dan identifikasi sasaran program. Kegiatan pendataan yang dilakukan oleh puskesmas menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa pelayanan KB dapat diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan program dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dapat tercapai secara lebih efektif.



Gambar 4.9 Melakukan pendataan

Sumber kampungkb.kemendukbangga

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran berlangsung melalui tahapan yang cukup jelas. Puskesmas bersama penyuluh KB dan kader melakukan identifikasi serta pemetaan terhadap masyarakat yang belum mengikuti program KB maupun peserta yang sudah tidak aktif menggunakan alat kontrasepsi. Proses ini dilakukan untuk menemukan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, seperti rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya informasi mengenai program KB, serta adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Para stakeholder juga memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan Program KB. Program KB dipandang tidak hanya sebagai upaya mengendalikan angka kelahiran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas, serta mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi dasar bagi para stakeholder dalam melaksanakan program secara bersama-sama. Stakeholder juga saling membahas sasaran program, kebutuhan pelayanan, lokasi kegiatan, hingga berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui komunikasi dan musyawarah tersebut, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Puskesmas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, konseling, dan pelayanan kontrasepsi, sedangkan kader KB berperan dalam melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk mengikuti program, serta mendampingi peserta KB. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan program. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa principled engagement dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran telah terbangun melalui proses komunikasi, koordinasi, dialog, dan penyamaan tujuan antar stakeholder yang dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung keberhasilan program KB dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Dilanjutkan dengan penjelasan dari Ibu Susi Selaku kader KB Kecamatan Kenjeran :

“Kalau untuk keterlibatan kader disini si Biasanya melakukan penyuluhan di posyandu, kegiatan PKK, atau waktu ada pertemuan warga. Di situ kami memberikan penjelasan mengenai manfaat KB dan pentingnya mengatur jarak kelahiran. Kadang masih ada ibu-ibu yang belum paham tentang KB atau masih takut menggunakan alat kontrasepsi karena dengar cerita dari tetangga atau orang lain. Jadi kami jelaskan pelan-pelan sesuai yang mereka tanyakan. Biasanya mereka banyak bertanya soal efek samping KB, alat kontrasepsi yang cocok, atau apakah KB aman untuk kesehatan. Kami

berusaha memberikan penjelasan yang mudah dipahami supaya masyarakat tidak salah mengerti. Kalau ada warga yang tidak bisa hadir saat penyuluhan, biasanya kami sampaikan informasinya saat bertemu di lingkungan atau ketika ada kegiatan lain. Yang penting masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan tidak hanya mendengar dari cerita orang lain. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah lebih terbuka, terutama ibu-ibu muda yang mulai sadar pentingnya ikut program KB untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan keluarga.”

Kutipan tersebut diperkuat dengan adanya dokumen dan publikasi kegiatan Kampung KB yang menunjukkan bahwa kader KB secara aktif terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam berbagai kegiatan Kampung KB, kader berperan sebagai fasilitator yang membantu menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga kepada kelompok sasaran. Dokumentasi kegiatan tersebut memperlihatkan kader sedang memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan. Hal ini membuktikan bahwa peran kader tidak hanya sebatas membantu administrasi dan pendataan keluarga, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan. Dengan demikian, keberadaan kader KB menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana karena mampu menjembatani penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kader turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.



Gambar 4.10 Penyuluhan KB di Posyandu

Sumber kampungkb.kemendukbangga

Informan dari pihak BKKBN Provinsi Jawa Timur Bapak Toma Afriandi, S.H., M.Si / Dalduk juga menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antar stakeholder menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program KB. Beliau menyampaikan bahwa:

“BKKBN secara rutin melakukan koordinasi dengan DP3APPKB, penyuluh KB, puskesmas, serta stakeholder lainnya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Biasanya koordinasi dilakukan melalui pertemuan, monitoring, dan evaluasi program sehingga perkembangan pelaksanaan KB di lapangan dapat diketahui secara langsung. Dari koordinasi tersebut, berbagai kendala yang muncul di lapangan bisa segera dibahas dan dicari solusi bersama. Menurut kami, keberhasilan program KB tidak hanya bergantung pada satu instansi saja, tetapi membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang terlibat. Karena itu komunikasi harus terus dijaga agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap selaras dan tujuan program dapat tercapai dengan baik.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa BKKBN memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam Program KB. Melalui koordinasi yang dilakukan secara rutin, setiap stakeholder dapat saling bertukar informasi, menyampaikan perkembangan program, serta mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Dari sisi masyarakat, keterlibatan dalam proses komunikasi dan sosialisasi juga terlihat dari partisipasi warga dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Ibu Ajeng selaku peserta KB menyampaikan bahwa:

“Kami sering mendapatkan informasi dari kader KB maupun petugas puskesmas saat kegiatan posyandu atau pertemuan warga. Dari kegiatan tersebut kami jadi lebih memahami manfaat KB dan pentingnya mengatur jarak kelahiran untuk kesehatan ibu dan anak. Biasanya kalau ada penyuluhan, petugas juga menjelaskan berbagai jenis alat kontrasepsi dan manfaatnya, jadi kami bisa lebih paham sebelum memilih. Kalau ada hal yang belum dimengerti, kami juga bisa langsung bertanya kepada kader atau petugas kesehatan. Menurut saya, kegiatan seperti ini sangat membantu karena masyarakat mendapatkan informasi secara langsung dari orang yang memang memahami program KB. Sekarang masyarakat juga sudah lebih terbuka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi karena mereka merasa informasi yang diberikan bermanfaat untuk keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa masyarakat tidak hanya menjadi sasaran program, tetapi juga terlibat aktif dalam proses komunikasi yang

berlangsung antara stakeholder dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kader KB dan tenaga kesehatan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pertanyaan, serta memahami manfaat Program KB secara lebih baik.

Informan juga menambahkan bahwa:

“Kalau ada sosialisasi atau penyuluhan, kami biasanya hadir karena ingin mengetahui informasi terbaru tentang KB. Penjelasan dari kader dan petugas kesehatan cukup membantu kami dalam memahami program yang diberikan pemerintah. Dulu saya juga belum terlalu paham mengenai manfaat KB, tetapi setelah beberapa kali mengikuti penyuluhan, saya jadi lebih mengerti pentingnya mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, kalau ada informasi yang kurang jelas, kami bisa langsung bertanya sehingga tidak hanya mendengar informasi dari orang lain yang belum tentu benar.”

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan menjadi bukti bahwa komunikasi yang dibangun telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap penerimaan masyarakat terhadap program.

2. Shared Motivation

Shared motivation merupakan kondisi ketika stakeholders memiliki rasa saling percaya, komitmen, dan tujuan bersama dalam menjalankan kolaborasi. Dalam program KB di Kecamatan Kenjeran, shared motivation terlihat dari adanya kesamaan tujuan antar stakeholders untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Setiap stakeholders memiliki peran masing-masing namun tetap saling mendukung satu sama lain. DP3APPKB bertugas melakukan koordinasi program, BKKBN memberikan pembinaan dan dukungan kebijakan, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dan kontrasepsi, sedangkan kader KB membantu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Keterlibatan seluruh pihak tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan program KB. Shared motivation juga dibangun melalui hubungan sosial yang baik antara kader KB dan masyarakat. Kedekatan kader dengan masyarakat membuat warga lebih mudah menerima informasi terkait program KB serta meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah dan tenaga kesehatan.

Menurut pernyataan informan Bapak Toma Afriandi, S.H., M.Si / Dalduk BKKBN Provinsi Jawa Timur, Menjelaskan bahwa :

“Kalau dalam pelaksanaan program KB ini yang paling penting sebenarnya adalah adanya tujuan yang sama dari semua pihak yang terlibat. BKKBN, DP3APPKB, puskesmas, penyuluh KB, kader, sampai pemerintah wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu meningkatkan kualitas keluarga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Selama ini kami melihat komitmen dari masing-masing pihak cukup baik karena setiap stakeholder berusaha menjalankan perannya dengan maksimal. Ketika ada kendala di lapangan, biasanya tidak dibiarkan menjadi masalah masing-masing, tetapi dibahas bersama untuk dicari jalan keluarnya. Menurut saya, hal seperti ini menunjukkan bahwa ada rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Kami juga membangun hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder karena keberhasilan program KB tidak mungkin dicapai oleh satu instansi saja. Harus ada rasa saling percaya, saling mendukung, dan keyakinan bahwa setiap pihak bekerja untuk tujuan yang sama. Kalau hubungan antar stakeholder baik, koordinasi juga menjadi lebih mudah dan program bisa berjalan lebih efektif.” (Wawancara 19, Mei 2026).

Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya rasa saling percaya dan saling mendukung antar stakeholder menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga kolaborasi dapat berjalan secara efektif.

Ibu Sinta Bidan Koordinator Program KB Puskesmas Kenjeran menjelaskan bahwa:

“Kami selalu berusaha mendukung pelaksanaan program KB karena manfaatnya memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya kami tidak pernah bekerja sendiri karena selalu ada dukungan dari penyuluh KB, kader, dan pemerintah wilayah. Kalau ada kendala di lapangan biasanya langsung dibicarakan bersama. Kami merasa setiap pihak memiliki kepedulian yang sama terhadap keberhasilan program ini. Misalnya ketika ada masyarakat yang masih ragu mengikuti KB, kami bersama kader dan penyuluh KB akan mencari cara yang paling tepat untuk memberikan pemahaman. Jadi semua pihak benar-benar terlibat dan memiliki komitmen yang sama agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik.” (Wawancara pada 23 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen dan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Stakeholder tidak hanya menjalankan tugas formalnya, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberhasilan program secara keseluruhan.

Ibu Susi Selaku Kader KB menyatakan bahwa:

“Karena kami tinggal satu lingkungan dengan masyarakat, jadi warga biasanya lebih terbuka kepada kami. Kalau ada pertanyaan tentang KB atau ada yang masih ragu menggunakan alat kontrasepsi, mereka sering datang langsung untuk bertanya. Kadang mereka lebih nyaman bercerita kepada kader karena sudah saling mengenal sejak lama. Kami juga berusaha menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang sesuai dengan arahan dari penyuluh KB dan petugas kesehatan. Menurut saya, kalau masyarakat sudah percaya kepada kader dan petugas kesehatan, penyampaian informasi tentang KB menjadi lebih mudah diterima. Sekarang masyarakat juga lebih terbuka dibandingkan dulu karena mereka melihat bahwa program KB memang memberikan manfaat bagi keluarga mereka.” (Wawancara pada 25, Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kader KB menjadi salah satu faktor penting dalam membangun *shared motivation*. Hubungan yang dekat antara kader dan masyarakat menciptakan rasa percaya sehingga masyarakat lebih mudah menerima informasi dan berpartisipasi dalam program.

Ibu Ajeng Selaku peserta KB Menyampaikan bahwa:

“Menurut saya kader KB sama penyuluh dan bidan di sini memang cukup perhatian sama masyarakat. Kalau ada kegiatan penyuluhan atau pelayanan KB, mereka selalu menjelaskan dengan sabar dan nggak pernah keberatan kalau kami banyak tanya. Dulu saya juga sempat kurang paham soal KB, tapi karena sering ikut penyuluhan dan dapat penjelasan langsung dari kader sama bidan, akhirnya jadi lebih mengerti. Kalau ada informasi yang belum jelas biasanya saya langsung tanya dan pasti dijelaskan sampai paham. Jadi lama-lama saya merasa percaya sama informasi yang mereka sampaikan. Saya lihat mereka juga bukan cuma menjalankan tugas saja, tapi memang ingin membantu masyarakat supaya lebih memahami manfaat KB. Karena itu saya jadi lebih yakin ikut program KB dan beberapa tetangga saya juga merasakan hal yang sama.” (Wawancara pada 25, Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap kader KB dan petugas kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan Program KB. Kepercayaan tersebut terbentuk karena adanya interaksi yang berlangsung secara terus-menerus melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan kesehatan, maupun komunikasi langsung yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Cara penyampaian informasi yang mudah dipahami serta sikap kader dan petugas kesehatan yang terbuka terhadap pertanyaan masyarakat membuat warga merasa lebih nyaman untuk berdiskusi mengenai program KB.

Selain itu, pernyataan informan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses komunikasi dengan mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi terkait penggunaan alat kontrasepsi maupun manfaat program KB. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan stakeholder yang terlibat dalam program. Hubungan yang terjalin secara positif ini pada akhirnya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program KB serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

3. Capacity for Joint Action

Capacity for joint action merupakan kemampuan stakeholders dalam melaksanakan tindakan bersama melalui pembagian tugas, sumber daya, kepemimpinan, dan prosedur kerja yang mendukung kolaborasi. Dalam program KB di Kecamatan Kenjeran, *capacity for joint action* terlihat melalui adanya pembagian peran yang jelas antar stakeholders sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. DP3APPKB Kota Surabaya berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan program KB, sedangkan puskesmas berfokus pada pelayanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi kepada masyarakat. Selain itu, kader KB membantu dalam pendataan keluarga, penyebaran informasi program, dan mengajak masyarakat untuk mengikuti pelayanan KB. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, pelaksanaan program KB dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah kader KB dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Kendala tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas collaborative governance pada program KB di Kecamatan Kenjeran.

Bapak Toma Afriandi, S.H., M.Si / Dalduk BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Rina selaku Analis Kebijakan Keluarga Berencana, menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program KB, setiap pihak sebenarnya sudah memiliki tugas dan peran masing-masing yang saling mendukung satu sama lain. Dari BKKBN kami berperan dalam memberikan arahan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi agar program yang dijalankan di daerah tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan di lapangan tentu melibatkan banyak pihak seperti DP3APPKB, penyuluh KB, puskesmas, kader KB, dan pemerintah wilayah. DP3APPKB bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dan kontrasepsi, sedangkan kader KB membantu melakukan pendataan, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Menurut kami, pembagian tugas seperti ini sangat penting karena program KB tidak mungkin dijalankan oleh satu pihak saja. Selain itu, kami juga melakukan pembinaan kepada

penyuluh dan kader agar mereka memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, di lapangan masih ada beberapa kendala seperti jumlah kader yang terbatas dan masih adanya masyarakat yang belum memahami manfaat program KB atau masih ragu menggunakan alat kontrasepsi. Karena itu diperlukan kerja sama yang kuat, komunikasi yang baik, dan dukungan dari seluruh stakeholder agar pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal dan tujuan program dapat tercapai.” (Wawancara 19, Mei 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya dokumentasi dan informasi resmi dari BKKBN yang menunjukkan bahwa BKKBN memiliki fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan Program Bangsa Kencana dan Program Keluarga Berencana di berbagai daerah. Kegiatan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan berjalan sesuai dengan kebijakan, standar pelayanan, dan target yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring tersebut, BKKBN dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan, memberikan arahan kepada pelaksana program, serta melakukan evaluasi terhadap capaian program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, pernyataan informan mengenai peran BKKBN dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi tidak hanya berdasarkan hasil wawancara, tetapi juga didukung oleh dokumentasi resmi yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama BKKBN dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Hal ini membuktikan bahwa BKKBN tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga terlibat aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi program di daerah guna mendukung tercapainya tujuan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.



Gambar 4.11 Kepala BKKBN Tekankan pentingnya monitoring dan manajemen prioritas kepada penyuluh KB

Sumber Jatim.BKKBN

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Wildan Selaku Penyuluh KB pihak DP3APPKB Kota Surabaya, menyatakan bahwa:

“Kalau dari pihak DP3APPKB bertugas melakukan perencanaan program, koordinasi kegiatan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program di wilayah. Sementara itu, puskesmas berfokus pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat, sedangkan kader KB membantu melakukan pendataan keluarga, menyampaikan informasi program, serta mengajak masyarakat untuk mengikuti pelayanan KB. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya kami melakukan pembagian tugas terlebih dahulu agar setiap pihak memahami tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, kegiatan di lapangan menjadi lebih terarah dan pelaksanaannya lebih mudah dilakukan. Namun kami juga masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah kader dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus didampingi dan masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya program KB. Oleh karena itu, kami terus melakukan pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan KB.” (Wawancara pada 21, Mei 2026).

Selanjutnya, informan dari pihak Puskesmas Kecamatan Kenjeran Ibu Sinta menjelaskan bahwa:

“Kalau dari puskesmas, tugas kami lebih banyak pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat. Kami memberikan pelayanan seperti suntik KB, pil KB, implant, IUD, sampai konseling bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai KB. Dalam pelaksanaannya kami juga bekerja sama dengan penyuluh KB dan kader KB yang membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mengajak warga untuk datang ke pelayanan. Sebelum kegiatan biasanya kami sudah berkoordinasi terlebih dahulu terkait jadwal pelayanan, sasaran yang akan dilayani, dan kebutuhan tenaga kesehatan maupun alat kontrasepsi yang diperlukan. Dengan adanya kerja sama seperti itu, pelayanan bisa berjalan lebih lancar karena masing-masing pihak sudah memahami tugasnya. Namun di lapangan masih ada beberapa kendala, misalnya ada masyarakat yang masih takut menggunakan alat kontrasepsi

atau kurang memahami manfaat program KB sehingga perlu diberikan penjelasan secara berulang dan pendekatan yang lebih intensif.” (Wawancara pada 23, Mei 2026).

Selain itu, informan dari Ibu Susi kader KB Kenjeran juga menyampaikan bahwa:

“Kalau peran kami sebagai kader KB itu lebih banyak membantu di lapangan. Biasanya kami melakukan pendataan keluarga, terutama pasangan usia subur yang menjadi sasaran program KB. Selain itu, kami juga menyampaikan informasi kepada masyarakat kalau ada kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, atau program-program lain yang berkaitan dengan keluarga berencana. Karena kami tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari, jadi kami lebih mudah mengetahui kondisi warga dan menyampaikan informasi secara langsung. Kami juga sering membantu mengajak masyarakat untuk datang ke pelayanan KB atau kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh puskesmas maupun penyuluh KB. Kalau ada warga yang masih bingung atau ingin mengetahui informasi tentang KB, biasanya mereka bertanya terlebih dahulu kepada kami. Setelah itu kami membantu memberikan penjelasan sesuai informasi yang kami terima dari penyuluh KB dan petugas kesehatan. Jadi bisa dibilang peran kami adalah membantu menjembatani informasi antara masyarakat dengan petugas kesehatan maupun pemerintah agar program KB bisa lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.” (Wawancara Pada 25, Mei 2026).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kader KB memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran. Peran tersebut tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan instansi pelaksana program KB, seperti penyuluh KB, puskesmas, dan pemerintah. Pernyataan Ibu Susi menunjukkan bahwa kader KB terlibat secara aktif dalam melakukan pendataan keluarga, khususnya pasangan usia subur (PUS), yang menjadi sasaran utama program KB. Kegiatan pendataan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program karena memungkinkan para pelaksana untuk mengetahui jumlah sasaran, kondisi keluarga, serta kebutuhan pelayanan KB yang diperlukan di wilayah tersebut.

Kutipan tersebut juga diperkuat dengan adanya data pendataan keluarga yang dilakukan secara berkala oleh kader KB di tingkat kelurahan. Melalui pendataan tersebut, kader dapat mengidentifikasi pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB, keluarga yang memerlukan edukasi terkait kesehatan reproduksi, maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kontrasepsi. Hasil pendataan

kemudian dilaporkan kepada penyuluh KB dan pihak terkait sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, serta evaluasi capaian program. Dengan adanya pendataan yang dilakukan langsung oleh kader di lapangan, informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat karena kader memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan memahami kondisi lingkungan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kader KB tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Oleh karena itu, keberadaan kader KB melalui kegiatan pendataan keluarga menjadi salah satu faktor yang memperkuat efektivitas kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran.

PASANGAN USIA SUBUR YG BELUM BER.KB... KAMPUNG KB POGOBAR INDAH KEL.TANAH KALI - KEDINDING KEC.KENJERAN.TAHUN 2026							
NO	RW	ALASAN PUS YG TIDAK BER.KB.					JUMLAH
		HAJIR	SPONTANUS STERIL	DIJALAN BERKEBUTUHAN	TIDAK DIJALAN BERKEBUTUHAN	LAINNYA	
1	I	8	17	23	36	230	414
2	II	15	9	22	74	131	251
3	III	2	0	16	56	97	171
4	IV	21	13	97	103	230	704
5	V	19	7	24	107	106	263
6	VI	5	3	3	141	48	160
7	VII	3	3	3	8	84	91
8	VIII	2	-	15	25	-	42
9	IX	14	8	27	78	60	181
10	X	48	15	0	94	122	279
11	XI	1	1	1	5	20	28
12	XII	3	2	-	8	29	42
Jumlah		192	85	236	735	1066	2218

PESERTA KB.AKTIF WILAYAH KAMPUNG KB. TAHUN:2026 KEL.TANAH KALIKEDINDING KEC.KENJERAN										
NO	RW	PUS	JENIS KONTRASEPSI							JUMLAH
			IUD	MDM	MDP	IMPLAN	SETIR	PIL	BAHWA	
1	I	1.280	98	23	3	63	518	190	12	867
2	II	529	41	23	0	29	109	78	7	280
3	III	443	9	8	0	11	240	21	1	290
4	IV	1.420	61	46	0	99	408	94	13	718
5	V	658	36	19	2	21	244	77	6	391
6	VI	299	10	28	6	9	88	10	2	196
7	VII	143	10	3	0	0	46	28	5	92
8	VIII	143	2	7	5	9	120	6	1	156
9	IX	244	4	13	0	7	79	39	6	151
10	X	954	35	63	2	39	330	94	0	604
11	XI	53	5	4	0	7	7	4	0	23
12	XII	69	12	2	0	7	8	1	0	30
JUMLAH			6.742	399	203	78	2.018	604	67	11.440

PASANGAN USIA SUBUR YG BELUM BER.KB .. KAMPUNG KB POGOBAR UMDAH KEL.TANAH KALI - KEDINDING KEC.KENJERAN. TAHUN 2026									
NO	RW	ALASAN PUS YG TIDAK BER.KB.					JUMLAH	KETERANGAN	
		Jumlah	Alasan	Alasan	Alasan	Alasan			
1	I	3	12	23	16	28	43		
2	II	15	7	22	79	101	101		
3	III	2	8	16	95	97	97		
4	IV	21	15	97	103	230	230		
5	V	19	7	24	107	106	106		
6	VI	3	3	3	104	109	109		
7	VII	3	3	3	8	10	10		
8	VIII	2	-	15	25	-	15		
9	IX	14	8	29	18	60	150		
10	X	48	15	4	10	122	130		
11	XI	1	1	1	5	10	10		
12	XII	3	2	-	8	45	25		
Jumlah		102	85	234	735	1044	2278		

Gambar 4.12 Data KB Kecamatan Kenjeran

Sumber Rumah Data Kampung KB Kecamatan Kenjeran

Berdasarkan hasil wawancara dengan BKKBN, DP3APPKB, Puskesmas Kenjeran, dan kader KB, dapat diketahui bahwa capacity for joint action dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran telah terlihat melalui adanya pembagian tugas, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya yang jelas di antara stakeholder yang terlibat. BKKBN berperan dalam memberikan pembinaan, arahan, monitoring, dan evaluasi program, DP3APPKB bertugas melakukan perencanaan serta koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, sedangkan kader KB berperan dalam pendataan keluarga, penyampaian informasi, serta pendampingan masyarakat. Pembagian peran tersebut didukung dengan koordinasi yang dilakukan secara rutin sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, adanya pembinaan kepada penyuluh dan kader KB menunjukkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan program. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah kader KB dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus didampingi serta masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan alat kontrasepsi. Meskipun demikian, melalui kerja sama, koordinasi, dan dukungan antar stakeholder yang terus dilakukan, pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran tetap dapat berjalan dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan stakeholder dalam melaksanakan tindakan bersama telah terbentuk melalui struktur peran yang jelas, dukungan sumber daya manusia, serta prosedur kerja yang mendukung kolaborasi dalam mencapai tujuan program KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

4.2.1.2 Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi merupakan bentuk nyata kerja sama yang dilakukan stakeholders dalam mendukung pelaksanaan program KB di Kecamatan Kenjeran. Tindakan kolaborasi diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan KB terpadu, pembentukan Kampung KB, serta monitoring dan evaluasi program. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara rutin oleh tenaga kesehatan dan kader KB melalui kegiatan posyandu, PKK, maupun pertemuan warga. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi. Selain itu, pelayanan KB juga dilakukan secara langsung di puskesmas maupun pelayanan keliling agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pelayanan kontrasepsi.

Program Kampung KB menjadi salah satu bentuk tindakan kolaborasi antar stakeholders dalam mendukung pembangunan keluarga. Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan KB tetapi juga kegiatan pemberdayaan keluarga seperti edukasi kesehatan, pembinaan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bapak Toma Afriandi, S.H., M.Si selaku Dalduk BKKBN Provinsi Jawa Timur, Menyampaikan bahwa:

“Kalau bicara mengenai tindakan nyata dalam Program KB, yang dilakukan itu sebenarnya cukup banyak dan semuanya melibatkan berbagai pihak. Jadi bukan hanya BKKBN saja atau DP3APPKB saja yang bekerja, tetapi semua stakeholder ikut terlibat sesuai tugasnya masing-masing. Misalnya saat ada pelayanan KB serentak atau pelayanan KB dalam rangka kegiatan tertentu, kami berkoordinasi dengan DP3APPKB, puskesmas, pemerintah wilayah, dan kader KB untuk memastikan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya dilakukan perencanaan terlebih dahulu, mulai dari menentukan sasaran, jumlah peserta, lokasi kegiatan, sampai kebutuhan tenaga kesehatan dan alat kontrasepsi yang diperlukan. Setelah itu masing-masing pihak menjalankan tugasnya. Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dan kontrasepsi, penyuluh KB melakukan pendampingan serta edukasi, sementara kader membantu menginformasikan kegiatan kepada masyarakat dan mengajak warga untuk datang. Selain pelayanan KB, kami juga melaksanakan pembinaan Kampung KB, kegiatan edukasi keluarga, pembinaan kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Jadi tindakan kolaborasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga bagaimana membangun kualitas keluarga secara menyeluruh. Menurut kami, kalau semua pihak aktif dan mau bekerja sama,

program akan lebih mudah diterima masyarakat dan hasilnya juga lebih maksimal.” (Wawancara 19, Mei 2026).

Bapak Wildan selaku Penyuluh KB dari DP3APPKB Kota Surabaya yang menyatakan bahwa:

“Kalau di lapangan, bentuk kerja sama yang paling sering kami lakukan adalah kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB kepada masyarakat. Biasanya sebelum kegiatan dilaksanakan kami melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan puskesmas, kader KB. Setelah itu kami menentukan sasaran kegiatan, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Saat pelaksanaan penyuluhan, kami memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat KB, kesehatan reproduksi, pentingnya mengatur jarak kelahiran, dan berbagai informasi lain yang berkaitan dengan keluarga berencana. Tidak jarang kami juga menemukan masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai KB, sehingga kami harus memberikan penjelasan secara lebih rinci. Selain penyuluhan, kami juga melaksanakan pelayanan KB bersama puskesmas sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga bisa langsung memperoleh pelayanan kontrasepsi. Setelah kegiatan selesai biasanya kami melakukan evaluasi untuk melihat jumlah peserta yang hadir, jumlah akseptor baru, serta kendala yang ditemukan selama kegiatan berlangsung. Dari hasil evaluasi tersebut kemudian kami menyusun langkah-langkah perbaikan untuk kegiatan berikutnya agar pelaksanaan program semakin baik.” (Wawancara pada 21, Mei 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kader KB Ibu Susi yang menyampaikan bahwa:

“ Selama ini kami selalu mendapatkan pembinaan dan arahan dari DP3APPKB melalui penyuluh KB yang ada di wilayah. Biasanya sebelum ada kegiatan, kami diberikan informasi terlebih dahulu mengenai tujuan kegiatan, sasaran yang akan dituju, serta hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga dibantu dalam penyediaan materi sosialisasi dan data sasaran yang akan didatangi. Saat ada kegiatan pelayanan atau penyuluhan, penyuluh KB juga ikut mendampingi kami sehingga kalau ada masyarakat yang bertanya lebih rinci mengenai program KB atau penggunaan alat kontrasepsi bisa langsung diberikan penjelasan. Kami sebagai kader lebih banyak membantu menyampaikan informasi kepada warga, mengajak masyarakat untuk hadir dalam kegiatan, dan mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung. Dengan adanya arahan dan pendampingan tersebut, kami merasa lebih terbantu dalam menjalankan tugas karena tidak bekerja

sendiri, tetapi mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam program KB.” (Wawancara pada 25, Mei 2026).

Ibu sinta tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Kenjeran, Informan menyatakan bahwa:

“ Pihak puskesmas secara rutin melaksanakan pelayanan KB bersama kader KB dan pemerintah wilayah sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan pelayanan langsung di lingkungan masyarakat, seperti di balai RW, posyandu, maupun kegiatan terpadu lainnya. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyuluh KB dan kader terkait jumlah sasaran, kebutuhan alat kontrasepsi, serta tenaga kesehatan yang akan bertugas. Saat kegiatan berlangsung kami memberikan pelayanan kontrasepsi, konseling, dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi serta manfaat program KB. Kader KB membantu menginformasikan kegiatan kepada masyarakat dan mendampingi peserta yang datang, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih lancar. Menurut kami, kerja sama seperti ini sangat penting karena pelayanan akan lebih mudah menjangkau masyarakat apabila dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya.” (Wawancara pada 23, Mei 2026).



Gambar 4.13 ¹⁰ Bakti Sosial Pelayanan KB IUD Implant di Puskesmas Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran

Sumber DP3APPKB Surabaya



Gambar 4.14 Pertemuan dalam Kolaborasi Lintas Sektor

Sumber : kemenduk bangga

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan kolaborasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan banyak stakeholders sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. BKKBN berperan dalam memberikan pembinaan, penguatan program, serta arahan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan program KB di daerah. DP3APPKB Kota Surabaya berperan sebagai koordinator yang menghubungkan seluruh pihak yang terlibat dalam program, sedangkan puskesmas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat. Kader KB berperan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi program, melakukan pendataan keluarga, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan KB. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran tidak hanya berfokus pada pelayanan kontrasepsi, tetapi juga mencakup kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi program. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin melalui posyandu, pertemuan PKK, penyuluhan kelompok, maupun kunjungan langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh informasi mengenai manfaat keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pentingnya perencanaan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Selain sosialisasi dan pelayanan kesehatan, tindakan kolaborasi juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kampung KB. Program ini menjadi wadah kolaborasi berbagai stakeholder dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pembinaan keluarga, peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi. Keberadaan Kampung KB menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pengendalian angka kelahiran, tetapi juga pada pembangunan keluarga secara menyeluruh. Berdasarkan pernyataan

informan, koordinasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tindakan kolaborasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, seluruh pihak melakukan koordinasi dan pembagian tugas sesuai dengan peran masing-masing. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui capaian program serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Proses tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama antar stakeholder dalam mencapai tujuan program KB.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh BKKBN, DP3APPKB, puskesmas, kader KB, pemerintah kelurahan, serta organisasi masyarakat telah mencerminkan adanya kerja sama yang terintegrasi dalam pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap aktor untuk saling mendukung melalui pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan bersama guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB. Dapat disimpulkan bahwa tindakan kolaborasi dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kenjeran telah berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan KB terpadu, Program Kampung KB, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Keterlibatan berbagai stakeholder dengan peran yang saling melengkapi menunjukkan bahwa keberhasilan program KB sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama yang terjalin antaraktor dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga di Kecamatan Kenjeran.

4.2.1.3. Dampak dan Adaptasi

Dalam teori *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dampak dan adaptasi (*impacts and adaptation*) merupakan hasil yang muncul dari proses kolaborasi yang telah dilaksanakan. Dampak tersebut dapat berupa perubahan perilaku, peningkatan kinerja program, tercapainya tujuan bersama, serta kemampuan para aktor untuk beradaptasi terhadap berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan program. Pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran, dampak kolaborasi dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga serta terjaganya angka kelahiran pada tingkat yang terkendali. Sementara itu, adaptasi dilakukan oleh para stakeholder untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan program dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara DP3APPKB Bapak Wildan Selaku penyuluh KB menyatakan bahwa :

“Kolaborasi yang dilakukan selama ini memberikan hasil yang cukup baik. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB semakin meningkat

dibandingkan sebelumnya. Masyarakat sekarang lebih mudah mendapatkan informasi dan pelayanan KB karena adanya dukungan dari kader, puskesmas, dan pemerintah setempat.”

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa :

“Tujuan utama program ini adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga. Di Kota Surabaya sendiri angka Total Fertility Rate (TFR) sudah berada pada kisaran 2,1 yang merupakan angka ideal untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak dalam menjalankan program KB.” (Wawancara pada 21, Mei 2026).

Dari hasil wawancara tersebut sesuai dengan RENSTRA BKKBN Provinsi Jatim

Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024						
Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1
Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	Persen	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41

Gambar 4. 15 Total Fertility Rate (TFR)

Sumber Rencana Strategis BKKBN Jawa Timur 2020-2024

Bapak Toma Afriandi, S.H., M.Si / Dalduk dari pihak BKKBN yang menyampaikan bahwa :

“Kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir, dampak dari pelaksanaan Program KB sudah cukup terlihat. Masyarakat sekarang jauh lebih terbuka untuk menerima informasi mengenai KB dibandingkan sebelumnya. Dulu masih banyak masyarakat yang menganggap KB hanya untuk membatasi jumlah anak, tetapi sekarang pemahamannya sudah mulai berubah. Masyarakat mulai memahami bahwa KB juga berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, serta perencanaan masa depan keluarga. Selain itu, koordinasi antar stakeholder juga semakin baik sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah. Walaupun demikian, kami tetap harus menyesuaikan strategi di lapangan karena kondisi masyarakat terus berubah. Misalnya, sekarang kami lebih banyak memanfaatkan media sosial dan media digital sebagai sarana penyebaran informasi karena masyarakat

sudah lebih sering mengakses informasi melalui telepon genggam. Jadi, program harus terus beradaptasi agar tetap dapat menjangkau masyarakat secara efektif.” (Wawancara 19, Mei 2026).

Selain memberikan dampak positif, pelaksanaan Program KB juga menghadapi beberapa tantangan yang mengharuskan para aktor melakukan adaptasi. Salah satu tantangan yang sering ditemui adalah masih adanya masyarakat yang kurang memahami manfaat KB atau memiliki kekhawatiran terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

Terkait hal tersebut, kader KB menjelaskan bahwa:

“ Sampai sekarang memang masih ada beberapa warga yang belum mau ikut KB. Ada yang takut menggunakan alat kontrasepsi karena mendengar cerita dari orang lain, ada juga yang masih percaya kalau banyak anak itu banyak rezeki. Kalau menemukan kondisi seperti itu biasanya kami tidak langsung memaksa. Kami lebih sering melakukan pendekatan secara personal, datang ke rumah warga, ngobrol santai, lalu memberikan penjelasan sesuai kondisi keluarganya. Kadang kami juga mengajak mereka untuk berkonsultasi langsung dengan bidan atau petugas kesehatan supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas. Cara seperti itu biasanya lebih efektif dibanding hanya memberikan penyuluhan secara umum. Alhamdulillah, dari pendekatan yang kami lakukan banyak warga yang awalnya ragu akhirnya mau ikut KB setelah mendapatkan penjelasan yang benar. Sekarang masyarakat juga sudah lebih terbuka untuk bertanya mengenai KB dan kesehatan reproduksi. Kalau dulu banyak yang malu atau tidak mau membahas masalah tersebut, sekarang mereka lebih aktif mencari informasi dan datang ke kegiatan penyuluhan maupun pelayanan KB. Menurut saya, perubahan itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah semakin baik dan mereka mulai memahami bahwa program KB bukan hanya tentang membatasi jumlah anak, tetapi juga untuk menjaga kesehatan ibu, anak, dan kesejahteraan keluarga.” (Wawancara 25, Mei 2026)

Upaya adaptasi juga dilakukan oleh DP3APPKB dan penyuluh KB dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.

Yang di jelaskan Pak Wildan Penyuluh KB Surabaya Dari DP3APPKB:

“Saat ini penyampaian informasi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Kami juga memanfaatkan media sosial, grup WhatsApp, dan berbagai media komunikasi lainnya agar informasi mengenai KB dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.” (Wawancara pada 21, Mei 2026).



Gambar 4.16 Pelayanan KB serentak hari Keluarga Nasional ke-33

Sumber : Jatim.kemendukbangga

Ibu Sinta selaku Bidan Koordinator Program KB Puskesmas Kecamatan Kenjeran menyampaikan bahwa:

“Kalau dari yang kami lihat di lapangan, sekarang masyarakat sudah jauh lebih terbuka untuk berkonsultasi mengenai KB dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dulu masih banyak masyarakat yang datang ke pelayanan hanya untuk berobat, tetapi sekarang cukup banyak pasangan usia subur yang datang khusus untuk bertanya tentang alat kontrasepsi atau merencanakan penggunaan KB. Mereka juga sudah mulai memahami pentingnya mengatur jarak kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Selain itu, jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB juga cukup baik. Menurut kami, hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh kader, penyuluh KB, dan tenaga kesehatan sudah mulai diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga kesadaran mereka terhadap pentingnya perencanaan keluarga semakin meningkat.”
(Wawancara 23, Mei 2026)

Dari sisi masyarakat, dampak program KB dirasakan dalam bentuk meningkatnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga.

Ibu Ajeng selaku peserta KB yang menyatakan bahwa:

“Setelah mengikuti program KB, saya jadi lebih memahami pentingnya mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran. Dulu saya hanya tahu KB itu untuk mencegah kehamilan, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari kader dan petugas kesehatan saya jadi mengerti bahwa KB juga penting untuk menjaga

kesehatan ibu, kesehatan anak, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, sekarang informasi tentang KB juga lebih mudah didapatkan. Kalau ada kegiatan penyuluhan atau pelayanan biasanya kami mendapatkan informasi dari kader maupun melalui media sosial dan grup WhatsApp. Jadi kami bisa lebih cepat mengetahui jadwal kegiatan dan lebih mudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Program KB. Menurut saya, informasi dan pendampingan yang diberikan cukup membantu masyarakat dalam memahami manfaat KB dan mengambil keputusan terkait perencanaan keluarga.” (Wawancara 25, Mei 2026)

“Setelah mengikuti program KB, saya jadi lebih memahami pentingnya mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran. Dulu saya hanya tahu KB itu untuk mencegah kehamilan, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari kader dan petugas kesehatan saya jadi mengerti bahwa KB juga penting untuk menjaga kesehatan ibu, kesehatan anak, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, sekarang informasi tentang KB juga lebih mudah didapatkan. Kalau ada kegiatan penyuluhan atau pelayanan biasanya kami mendapatkan informasi dari kader maupun melalui media sosial dan grup WhatsApp. Jadi kami bisa lebih cepat mengetahui jadwal kegiatan dan lebih mudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Program KB. Menurut saya, informasi dan pendampingan yang diberikan cukup membantu masyarakat dalam memahami manfaat KB dan mengambil keputusan terkait perencanaan keluarga.” (Wawancara 25, Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat diketahui bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh BKKBN, DP3APPKB Kota Surabaya, Puskesmas Kecamatan Kenjeran, kader KB, serta masyarakat telah memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pengaturan jumlah dan jarak kelahiran. Masyarakat yang sebelumnya hanya memahami KB sebagai upaya membatasi jumlah anak, kini mulai memahami bahwa program KB juga bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, masyarakat juga semakin mudah memperoleh informasi dan pelayanan KB karena adanya dukungan dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam program. Dampak kolaborasi juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pasangan usia subur yang aktif berkonsultasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Dari sisi kinerja program, kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai stakeholder turut mendukung tercapainya tujuan Program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan

penduduk. Hal tersebut diperkuat dengan capaian Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya yang telah berada pada angka sekitar 2,1, yang merupakan angka ideal untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KB telah memberikan kontribusi terhadap pengendalian angka kelahiran melalui kerja sama yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh stakeholder. Meskipun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan Program KB. Salah satu tantangan yang masih sering ditemui adalah adanya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat Program KB, masih memiliki kekhawatiran terhadap penggunaan alat kontrasepsi, serta adanya pola pikir bahwa “banyak anak banyak rezeki”. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai peserta KB. Oleh karena itu, para stakeholder perlu melakukan berbagai bentuk adaptasi agar pelaksanaan program tetap berjalan secara efektif dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Bentuk adaptasi yang dilakukan terlihat dari upaya kader KB yang melakukan pendekatan secara personal melalui kunjungan rumah dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat KB sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga. Selain itu, DP3APPKB, penyuluh KB, dan tenaga kesehatan juga melakukan adaptasi melalui pemanfaatan media digital seperti media sosial dan grup WhatsApp sebagai sarana penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pola komunikasi masyarakat yang saat ini lebih banyak menggunakan media digital dalam memperoleh informasi. Berdasarkan teori Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dampak dan adaptasi dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang telah dilakukan mampu menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan program. Di sisi lain, berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan oleh stakeholder menunjukkan kemampuan kolaboratif untuk merespons tantangan yang muncul sehingga pelaksanaan Program KB dapat terus berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Collaborative Governance pada Program KB di Kecamatan Kenjeran

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *Collaborative Governance* merupakan suatu proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara optimal apabila hanya dilakukan oleh satu organisasi saja. Collaborative governance muncul sebagai pendekatan yang

menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks. Dalam pendekatan ini, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kemampuan para aktor untuk membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta tindakan bersama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Model Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjelaskan bahwa proses kolaborasi berlangsung melalui dinamika kolaborasi (*collaboration dynamics*) yang terdiri dari *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga komponen tersebut akan mendorong terbentuknya tindakan kolaboratif (*collaborative actions*) yang selanjutnya menghasilkan dampak dan kemampuan adaptasi (*impacts and adaptation*) terhadap berbagai perubahan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Collaborative Governance pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran menunjukkan adanya keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan. Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program meliputi BKKBN Provinsi Jawa Timur, DP3APPKB Kota Surabaya, Puskesmas Kecamatan Kenjeran, kader KB, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, PKK, serta masyarakat sebagai sasaran program. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk bukan merupakan tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan memerlukan kerja sama dan sinergi antar berbagai pihak agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan kualitas keluarga, serta mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Program KB tidak hanya berfokus pada penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan Program KB sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki kapasitas dan kewenangan berbeda dalam mendukung pelaksanaan program. Kecamatan Kenjeran merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi sehingga pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian. Tingginya jumlah penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh sebab itu, Program KB menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penerapan Collaborative Governance menjadi sangat relevan karena

pelaksanaan Program KB memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki sumber daya, pengetahuan, serta kewenangan yang berbeda-beda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran telah menerapkan prinsip-prinsip Collaborative Governance sebagaimana dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya koordinasi yang dilakukan secara rutin antar stakeholder, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan program, pembagian tugas yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga, serta adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan program. Selain itu, berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan juga menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Program KB, BKKBN Provinsi Jawa Timur berperan sebagai lembaga yang memberikan pembinaan, arahan kebijakan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah. DP3APKB Kota Surabaya bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program di tingkat kota sekaligus menjembatani koordinasi antara berbagai stakeholder yang terlibat. Puskesmas Kecamatan Kenjeran berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, konseling, serta pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat. Sementara itu, kader KB memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pendataan keluarga, sosialisasi program, pendampingan masyarakat, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Adanya pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder memiliki kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan Program KB. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin tidak hanya bersifat formal melalui rapat koordinasi atau kegiatan monitoring, tetapi juga berlangsung dalam berbagai aktivitas lapangan seperti penyuluhan, pelayanan KB terpadu, kegiatan posyandu, kegiatan PKK, pembentukan Kampung KB, serta kunjungan langsung kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak hanya terjadi pada tingkat perencanaan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai stakeholder tersebut, Program KB di Kecamatan Kenjeran mampu menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program. Sinergi tersebut terlihat dari adanya kesamaan tujuan, pembagian tugas yang jelas, dukungan sumber daya yang saling melengkapi, serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran dapat dikatakan telah mencerminkan penerapan Collaborative Governance sebagaimana yang dijelaskan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dimana keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh satu aktor, tetapi merupakan hasil dari kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak yang terlibat.

4.3.1.1 Dinamika Kolaborasi dalam Program KB

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dinamika kolaborasi (*collaboration dynamics*) merupakan inti dari proses *Collaborative Governance* yang menjelaskan bagaimana para aktor membangun dan mempertahankan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dinamika kolaborasi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga komponen tersebut saling memengaruhi dan menjadi dasar terbentuknya tindakan kolaboratif (*collaborative actions*) yang pada akhirnya menghasilkan dampak dan adaptasi (*impacts and adaptation*). Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran, dinamika kolaborasi terlihat melalui keterlibatan berbagai stakeholder yang terdiri dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, DP3APPKB Kota Surabaya, Puskesmas Kecamatan Kenjeran, kader KB, pemerintah wilayah, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, komitmen, dan dukungan sumber daya dari seluruh stakeholder yang terlibat. Program Keluarga Berencana tidak hanya berorientasi pada pengendalian angka kelahiran, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program memerlukan kolaborasi yang kuat antar stakeholder agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dinamika kolaborasi yang terbentuk menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran.

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika kolaborasi dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran telah berjalan melalui proses komunikasi yang intensif, adanya kesamaan tujuan antar stakeholder, pembagian peran yang jelas, serta pelaksanaan berbagai kegiatan bersama yang mendukung keberhasilan program. Selain itu, para stakeholder juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai tantangan yang muncul di lapangan, seperti rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai Program KB dan masih adanya persepsi bahwa banyak anak akan membawa lebih banyak rezeki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan interaksi sosial, pertukaran informasi, pembangunan kepercayaan, serta tindakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dinamika kolaborasi yang terbentuk menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan Program KB sebagai salah satu upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran.

Selanjutnya, dinamika kolaborasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran akan dianalisis berdasarkan komponen *principled engagement, shared motivation, capacity for joint action* sesuai dengan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012).

1. Principled Engagement (Keterlibatan Berprinsip) dalam Program KB

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *principled engagement* merupakan proses keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kolaborasi yang ditandai oleh adanya komunikasi, dialog, pencarian pemahaman bersama, serta proses pengambilan keputusan secara kolektif. Komponen ini menjadi fondasi awal dalam membangun kolaborasi karena melalui *principled engagement*, para aktor dapat menyamakan persepsi, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan tindakan bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran, *principled engagement* terlihat dari adanya interaksi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin antar stakeholder, yaitu BKKBN Provinsi Jawa Timur, DP3APPKB Kota Surabaya, Puskesmas Kecamatan Kenjeran, kader KB, pemerintah wilayah, serta masyarakat. Bentuk keterlibatan tersebut dilakukan melalui berbagai forum komunikasi seperti rapat koordinasi, sosialisasi program, serta pertemuan evaluasi pelaksanaan program KB di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar stakeholder dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran berjalan cukup aktif dan berkelanjutan. DP3APPKB Kota Surabaya berperan sebagai koordinator pelaksana program di tingkat kota yang menjembatani kebijakan dari BKKBN dengan pelaksanaan di lapangan melalui puskesmas dan kader KB. Sementara itu, puskesmas dan kader KB menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan edukasi, penyuluhan, serta pelayanan kontrasepsi. Selain itu, *principled engagement* juga terlihat dari adanya proses dialog dan pertukaran informasi yang dilakukan secara dua arah. Tidak hanya pemerintah yang memberikan arahan, tetapi juga terdapat umpan balik dari kader KB dan masyarakat terkait kendala di lapangan, seperti masih adanya persepsi bahwa program KB bertentangan dengan budaya memiliki banyak anak serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya pengaturan kelahiran. Dalam praktiknya, proses keterlibatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berlangsung dalam bentuk komunikasi informal di lapangan, terutama antara kader KB dan masyarakat. Kedekatan sosial kader KB dengan warga menjadi salah satu faktor yang memperkuat proses engagement, karena masyarakat cenderung lebih terbuka dan percaya dalam menyampaikan pertanyaan maupun kekhawatiran terkait program KB. *Principled engagement* dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, ditandai oleh

adanya komunikasi yang intensif, dialog antar aktor, serta upaya bersama dalam membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya program KB. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi di masyarakat yang menunjukkan bahwa proses engagement perlu terus diperkuat secara berkelanjutan agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

2. Shered Motivation dalam program KB Kecamatan Kenjeran

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *shared motivation* merupakan kondisi internal dalam kolaborasi yang mencerminkan adanya rasa saling percaya (*trust*), pemahaman bersama (*mutual understanding*), legitimasi, serta komitmen antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kolektif. *Shared motivation* terbentuk melalui proses interaksi yang berkelanjutan dalam *principled engagement*, dan menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran, *shared motivation* terlihat dari adanya kesamaan komitmen di antara para stakeholder dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga di masyarakat. Seluruh aktor yang terlibat, seperti BKKBN Provinsi Jawa Timur, DP3APPKB Kota Surabaya, Puskesmas Kecamatan Kenjeran, kader KB, pemerintah wilayah, dan masyarakat, menunjukkan kesadaran bahwa keberhasilan program KB tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kerja sama yang terkoordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian, rasa saling percaya antar aktor dalam pelaksanaan program KB sudah terbangun dengan cukup baik. DP3APPKB Kota Surabaya dan BKKBN sebagai lembaga pemerintah memiliki kepercayaan terhadap kinerja puskesmas dan kader KB dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebaliknya, puskesmas dan kader KB juga menunjukkan kepercayaan terhadap dukungan kebijakan, pendanaan, serta arahan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun BKKBN. Selain itu, *shared motivation* juga tercermin dari adanya kesamaan tujuan (*mutual goal*) dalam pelaksanaan program, yaitu menurunkan angka kelahiran dan mencapai *Total Fertility Rate* ideal sebesar 2,1 yang menjadi indikator keseimbangan pertumbuhan penduduk. Kesamaan tujuan ini menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan memperluas jangkauan pelayanan KB di masyarakat. Dari sisi komitmen, para stakeholder menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Hal ini terlihat dari keberlanjutan kegiatan sosialisasi, pelayanan kontrasepsi, serta pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan secara rutin. Kader KB sebagai ujung tombak di lapangan juga memiliki komitmen yang kuat karena kedekatan sosial dengan masyarakat memudahkan proses pendekatan dan edukasi terkait program KB.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam membangun *shared motivation* secara merata, terutama pada sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan budaya bahwa banyak anak merupakan sumber rezeki. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap program KB belum sepenuhnya seragam, sehingga membutuhkan penguatan edukasi dan pendekatan yang lebih persuasif. Dengan demikian, *shared motivation* dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran dapat dikatakan sudah terbentuk dengan cukup

baik di tingkat institusi dan pelaksana program, namun masih perlu penguatan pada tingkat masyarakat agar tercipta kesamaan motivasi yang lebih merata dalam mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.

3. Capacity for joint action dalam Program KB

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *capacity for joint action* merupakan kemampuan kolektif para aktor dalam kolaborasi untuk menggerakkan sumber daya, struktur, pengetahuan, serta mekanisme kerja sama secara terpadu guna mencapai tujuan bersama. Kapasitas ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencakup kemampuan mengorganisasi, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam sebuah sistem kolaboratif. Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran, *capacity for joint action* tercermin melalui adanya sistem kerja sama yang melibatkan berbagai tingkatan lembaga, mulai dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, DP3APPKB Kota Surabaya, Puskesmas Kecamatan Kenjeran, pemerintah wilayah, kader KB, hingga masyarakat sebagai sasaran program. Setiap aktor memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. BKKBN Provinsi Jawa Timur berperan sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan strategis, standar operasional, serta arah program nasional yang kemudian diturunkan ke tingkat daerah. DP3APPKB Kota Surabaya bertindak sebagai koordinator utama pelaksanaan program di tingkat kota yang berfungsi menjembatani kebijakan BKKBN dengan implementasi di lapangan. Dalam hal ini, DP3APPKB juga memiliki peran penting dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan program KB berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Puskesmas Kecamatan Kenjeran memiliki peran operasional yang sangat penting dalam pelaksanaan program KB, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, konsultasi KB, serta distribusi alat kontrasepsi kepada masyarakat. Puskesmas juga menjadi pusat layanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga menjadi garda terdepan dalam implementasi program di tingkat lokal. Selain itu, kader KB memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kader KB tidak hanya bertugas memberikan informasi dan sosialisasi mengenai program KB, tetapi juga melakukan pendekatan sosial secara langsung kepada warga. Kedekatan sosial ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, karena masyarakat cenderung lebih percaya dan terbuka kepada kader yang berasal dari lingkungan mereka sendiri.

Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran didukung oleh tenaga yang cukup beragam, mulai dari tenaga kesehatan, penyuluh KB, hingga kader masyarakat. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan jumlah kader di beberapa wilayah tertentu serta kebutuhan peningkatan kapasitas melalui pelatihan rutin, pembinaan teknis, dan penguatan pemahaman terkait perkembangan program KB terbaru. Program KB juga didukung oleh ketersediaan alat kontrasepsi, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun demikian, efektivitas pemanfaatan sumber daya tersebut sangat bergantung pada distribusi yang

merata serta kemampuan koordinasi antar lembaga dalam memastikan ketersediaan layanan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Dalam beberapa kondisi, tantangan seperti keterlambatan distribusi atau keterbatasan stok alat kontrasepsi masih dapat memengaruhi kelancaran layanan di lapangan. Selain sumber daya fisik, aspek pengetahuan dan kapasitas teknis juga menjadi bagian penting dalam *capacity for joint action*. Para pelaksana program, khususnya tenaga kesehatan dan kader KB, dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai metode kontrasepsi, strategi komunikasi perubahan perilaku, serta pendekatan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas pelaksana program.

Capacity for joint action dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran juga terlihat melalui adanya mekanisme koordinasi formal dan informal yang berjalan secara berkelanjutan. Koordinasi formal dilakukan melalui rapat rutin, pertemuan evaluasi program, serta pelaporan berkala antar instansi. Sementara itu, koordinasi informal banyak terjadi di lapangan antara kader KB, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai kendala secara langsung dan cepat. Selain itu, kepemimpinan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas kolaborasi. DP3APKB Kota Surabaya berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan seluruh stakeholder menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Kepemimpinan yang bersifat koordinatif dan kolaboratif ini membantu menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan program, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan peran antar aktor.

Namun demikian, meskipun *capacity for joint action* telah terbentuk dengan cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan jumlah kader di beberapa wilayah, perlunya peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta belum meratanya akses informasi KB di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, faktor budaya dan persepsi masyarakat juga masih menjadi hambatan non-teknis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, *capacity for joint action* dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran dapat disimpulkan telah berjalan cukup kuat melalui dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas, serta mekanisme koordinasi yang ada. Meskipun demikian, penguatan kapasitas tetap diperlukan, khususnya dalam peningkatan kompetensi pelaksana, optimalisasi distribusi sumber daya, serta penguatan peran kader KB agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan dalam mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

4.3.1.2 Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi (*collaborative actions*) merupakan bentuk nyata dari hasil proses kolaboratif yang telah dibangun antar pemangku kepentingan dalam suatu program. Dalam perspektif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012),

collaborative actions tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan keluaran dari interaksi antara *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga komponen tersebut menghasilkan tindakan bersama yang terstruktur, terkoordinasi, dan berorientasi pada pencapaian tujuan kolektif. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran, tindakan kolaborasi dapat dilihat dari berbagai aktivitas nyata yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti pada tahap komunikasi dan perencanaan, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk kegiatan operasional di lapangan yang melibatkan banyak pihak secara simultan. Secara umum, tindakan kolaboratif dalam program KB ini mencakup kegiatan sosialisasi, pelayanan kesehatan, pendampingan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Kegiatan sosialisasi menjadi salah satu bentuk utama tindakan kolaborasi yang dilakukan secara berulang oleh puskesmas, kader KB, serta didukung oleh DP3APPKB. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program KB, manfaat pengaturan jumlah anak, serta dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga. Selain sosialisasi, tindakan kolaborasi juga terlihat dalam bentuk pelayanan kontrasepsi yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun melalui kegiatan pelayanan langsung ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan bekerja sama dengan kader KB untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok yang sulit mengakses layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan berbasis pelayanan langsung kepada masyarakat. Tindakan kolaborasi juga tercermin dalam kegiatan pendampingan keluarga oleh kader KB. Kader KB memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat karena kedekatan sosial yang dimiliki. Pendampingan ini dilakukan melalui kunjungan langsung, diskusi informal, serta pemberian edukasi secara berkelanjutan kepada keluarga sasaran. Pendekatan ini membuat masyarakat lebih mudah menerima informasi karena disampaikan oleh pihak yang mereka kenal dan percaya. Tindakan kolaboratif juga diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan evaluasi program secara berkala. Rapat koordinasi antar stakeholder digunakan untuk membahas capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan solusi bersama. Hasil dari koordinasi ini kemudian menjadi dasar dalam perbaikan pelaksanaan program ke tahap berikutnya, sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Tindakan kolaborasi dalam program KB juga menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antar aktor. Pemerintah daerah melalui DP3APPKB berperan dalam perencanaan dan pengendalian program, puskesmas berfokus pada pelayanan kesehatan, kader KB melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, sedangkan pemerintah wilayah membantu dalam mobilisasi dan fasilitasi kegiatan di lingkungan masyarakat. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa tindakan

kolaboratif berjalan secara terstruktur dan saling melengkapi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan jangkauan sosialisasi di wilayah tertentu serta masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima program KB karena faktor budaya dan persepsi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kolaborasi tidak selalu berjalan secara ideal, tetapi tetap membutuhkan proses adaptasi dan pendekatan yang berkelanjutan. Tindakan kolaborasi dalam Program KB di Kecamatan Kenjeran dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas nyata yang dilakukan secara bersama oleh berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Tindakan ini mencerminkan bahwa kolaborasi tidak hanya sebatas kerja sama formal, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk implementasi program yang konkret, terarah, dan berkelanjutan di lapangan.

4.3.1.3 Dampak dan Adaptasi

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *impacts and adaptation* merupakan tahap akhir dalam dinamika *Collaborative Governance* yang menggambarkan hasil atau konsekuensi dari proses kolaborasi, sekaligus kemampuan para aktor untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, tantangan, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program. Pada tahap ini, kolaborasi tidak hanya dilihat dari output kegiatan semata, tetapi juga dari perubahan yang terjadi pada sistem, aktor, serta lingkungan sosial sebagai akibat dari proses kolaboratif yang berjalan. Dalam konteks Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran, *impacts and adaptation* dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program serta proses penyesuaian yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kedua aspek ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dari sisi dampak (*impacts*), pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Melalui berbagai kegiatan kolaboratif seperti sosialisasi, penyuluhan, pelayanan kesehatan reproduksi, serta pendampingan keluarga, masyarakat secara bertahap mulai memahami bahwa program KB bukan hanya bertujuan membatasi jumlah anak, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Pemahaman ini menjadi indikator penting bahwa proses edukasi yang dilakukan secara kolaboratif telah memberikan hasil yang positif. Selain peningkatan kesadaran, dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi. Kolaborasi antara puskesmas, kader KB, serta dukungan dari DP3APKB Kota Surabaya memungkinkan layanan KB dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan kesehatan formal. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelayanan

publik sebagai hasil dari kerja sama lintas sektor. Dampak lainnya juga terlihat pada aspek pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Program KB yang dilaksanakan secara kolaboratif berkontribusi dalam upaya mencapai angka *Total Fertility Rate* yang lebih ideal, sehingga pertumbuhan penduduk dapat lebih terkendali dan seimbang dengan kapasitas wilayah. Meskipun perubahan demografis tidak dapat terjadi secara instan, namun arah perubahan yang terjadi menunjukkan adanya dampak jangka panjang yang positif dari pelaksanaan program ini. Selain dampak pada masyarakat, *impacts* juga dapat dilihat pada penguatan hubungan antar stakeholder. Kolaborasi yang terjalin secara berkelanjutan telah menciptakan pola kerja sama yang lebih solid, di mana setiap aktor memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, dari sisi *adaptation*, pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kenjeran menunjukkan bahwa para aktor kolaborasi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan pendekatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang memiliki persepsi budaya bahwa banyak anak merupakan sumber rezeki. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses penerimaan program KB di masyarakat. Sebagai bentuk adaptasi, para stakeholder kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih persuasif, humanis, dan berbasis kedekatan sosial. Kader KB, misalnya, diperkuat perannya sebagai ujung tombak di masyarakat karena dianggap lebih efektif dalam menyampaikan informasi secara langsung dan membangun kepercayaan. Pendekatan ini dilakukan melalui kunjungan rumah, diskusi informal, serta pemanfaatan kegiatan masyarakat seperti posyandu dan pertemuan warga sebagai sarana edukasi. Selain itu, adaptasi juga dilakukan melalui peningkatan intensitas koordinasi antar stakeholder dalam merespons berbagai kendala teknis di lapangan. Misalnya, dalam menghadapi keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, dilakukan penyesuaian strategi melalui pelayanan jemput bola atau kegiatan pelayanan keliling. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kolaborasi tidak berjalan secara kaku, tetapi fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adaptasi juga terlihat dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan bagi kader KB serta tenaga kesehatan. Peningkatan kapasitas ini penting agar pelaksana program memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan edukasi, pelayanan, serta penanganan masalah yang muncul di lapangan.

Dengan demikian, adaptasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan. Lebih jauh lagi, proses adaptasi dalam program KB di Kecamatan Kenjeran juga menunjukkan adanya pembelajaran kolektif (*collective learning*) di antara para stakeholder. Pengalaman dalam pelaksanaan program dijadikan dasar untuk memperbaiki strategi, memperkuat

koordinasi, serta menyesuaikan pendekatan yang lebih efektif dalam menjangkau masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa kolaborasi yang terjadi tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga membentuk sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan demikian, *impacts and adaptation* dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Kenjeran dapat disimpulkan telah menunjukkan hasil yang cukup positif baik dari sisi perubahan sosial, peningkatan layanan, maupun penguatan kerja sama antar aktor. Selain itu, kemampuan adaptasi para stakeholder dalam menghadapi tantangan di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun bersifat dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya diukur dari hasil akhir program, tetapi juga dari sejauh mana sistem kolaborasi mampu menghasilkan perubahan dan beradaptasi secara efektif terhadap kondisi yang ada di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* pada Program Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan telah berjalan cukup baik melalui tiga komponen utama yaitu *collaboration dynamics*, *collaborative actions*, serta *impacts and adaptation*, di mana pada aspek *collaboration dynamics* yang mencakup *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang cukup intensif antar stakeholder seperti BKKBN, DP3APPKB Kota Surabaya, puskesmas, kader KB, pemerintah wilayah, dan masyarakat, serta adanya rasa saling percaya, komitmen, dan kesamaan tujuan dalam mendukung keberhasilan program KB meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait perbedaan persepsi masyarakat dan keterbatasan sumber daya di lapangan, kemudian pada aspek *collaborative actions* kolaborasi telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata seperti sosialisasi program KB, pelayanan kontrasepsi, pendampingan keluarga, serta koordinasi dan evaluasi lintas sektor yang menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat konseptual tetapi telah diimplementasikan secara operasional di lapangan, sedangkan pada aspek *impacts and adaptation* menunjukkan bahwa program KB telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga, meningkatnya akses layanan kesehatan reproduksi, serta kontribusi terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk, selain itu para aktor juga menunjukkan kemampuan adaptasi melalui penyesuaian strategi pendekatan berbasis komunitas dan penguatan peran kader KB, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Collaborative Governance pada Program KB di Kecamatan Kenjeran telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah bahwa BKKBN dan DP3APPKB Kota Surabaya diharapkan dapat terus memperkuat aspek *collaboration dynamics* melalui peningkatan intensitas komunikasi, koordinasi lintas sektor, serta penguatan integrasi program agar seluruh

stakeholder memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam pelaksanaan program KB, selain itu juga perlu adanya penguatan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah sasaran. Puskesmas Kecamatan Kenjeran diharapkan dapat meningkatkan kualitas *collaborative actions* dengan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan reproduksi, meningkatkan kegiatan edukasi masyarakat secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan pelayanan jemput bola agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses tetap dapat terlayani dengan baik. Kader KB diharapkan dapat terus memperkuat perannya dalam *capacity for joint action* melalui peningkatan kompetensi, kemampuan komunikasi persuasif, serta perluasan jangkauan pendampingan keluarga di masyarakat karena kader memiliki posisi strategis sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Kenjeran diharapkan dapat meningkatkan *shared motivation* dengan lebih terbuka terhadap informasi program KB serta berpartisipasi aktif dalam upaya perencanaan keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan kajian yang lebih mendalam, baik dengan membandingkan implementasi Collaborative Governance di wilayah lain maupun menganalisis faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keberhasilan kolaborasi pada program KB di tingkat lokal.

Skripsi

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

cdn.juris.id

Internet Source

1%

2

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

1%

3

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Dongguk University

Student Paper

<1%

5

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1%

6

cakrawalajournal.org

Internet Source

<1%

7

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<1%

8

repository.its.ac.id

Internet Source

<1%

9

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

10

dp3appkb.surabaya.go.id

Internet Source

<1 %

11

ojs.uho.ac.id

Internet Source

<1 %

12

repository.poltekeskupang.ac.id

Internet Source

<1 %

13

surabayakota.bps.go.id

Internet Source

<1 %

14

Bagus Purnomo Aji, Fitria Widiyani

Roosinda, Julyanto Ekantoro.

"IMPLEMENTASI KONTEN KREATIF

@MAHARAGUNG. ORGANIZER DALAM

MEMBANGUN BRAND AWARENESS", Jurnal

Administrasi Publuk dan Ilmu Komunikasi,

2022

Publication

<1 %

15

Okta Adioni Tinokae Rahma Suci. "Pengaruh

Ketimpangan Gender, Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja, dan Kepadatan Penduduk

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Indonesia", Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah,

2026

Publication

<1 %

16

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

17

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

repositori.unwira.ac.id

18

Internet Source

<1 %

19

repository.unp.ac.id

Internet Source

<1 %

20

adoc.pub

Internet Source

<1 %

21

aprinsani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

jurnalinterest.com

Internet Source

<1 %

23

publik.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

24

Siti Rohayati, Leo Agustino, Rina Yulianti.
"PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN
NYAPAH KECAMATAN WALANTAKA KOTA
SERANG", Jurnal Kebijakan Pembangunan
Daerah, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On